

PENGUNAAN DANA DESA DEMI TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DI DESA SODO

Mayya Reti Nur Alim, Angel Zeiromardalina Ghahar

Progam Studi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Tulungagung Email:

mayyanuralim2@gmail.com, zeiroangel15@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak

Postingan ini memakai cara kualitatif buat mendefinisikan anggaran dusun yang dipakai buat mensejahterakan warga di Dusun Sodo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Informasi yang dipakai merupakan berbentuk hasil tanya jawab dengan Ayah Kepala Dusun serta pemantauan di alun- alun. Hasil riset membuktikan kalau anggaran dusun diperuntukkan untuk warga di Dusun Sodo pada bermacam pandangan kehidupan yang terdapat. Dengan terdapatnya dorongan anggaran dusun, diharapkan warga memperoleh kenaikan pemasukan melewati usaha pembangunan prasarana serta aktivitas pemberdayaan warga. Oleh karena itu, warga wajib turut berfungsi pada pengawasan pengelolaan anggaran dusun buat kebutuhan bersama. Kejernihan dan kerjasama seluruh pihak merupakan kunci keberhasilan pengelolaan anggaran dusun di Dusun Sodo. Mulai dari cara pemograman sampai peliputan dicoba dengan cara terbuka serta dikenal oleh semua warga Dusun Sodo. Keselamatan social untuk warga merupakan tolok ukur dari suksesnya pembangunan. Oleh sebab itu, anggaran dusun berfungsi selaku pemecahan untuk warga Dusun Sodo buat menaikkan derajat kehidupan warga dengan bermacam dorongan dari faktor rezim.

Kata kunci:

Dana desa, kesejahteraan sosial, peningkatan hidup.

Pendahuluan

Dusun merupakan sesuatu area yang didiami oleh beberapa masyarakat yang silih memahami atas bawah ikatan kekerabatan serta kebutuhan politik, social, ekonomi, serta keamanan yang pada pertumbuhannya jadi sesuatu kesatuan warga hukum bersumber pada adat alhasil terwujud jalinan lahir hati antara tiap- tiap warganya.(Nugraha, 2019)

Bagi Nurcholis (Nurcholis, 2011), dusun ialah wilayah- wilayah yang mandiri di dasar arahan kerajaan pusat. Pada praktiknya, kerajaan pusat cuma menuntut kepatuhan dusun, sebaliknya gimana dusun menyelenggarakan pemerintahannya, kerajaan pusat tidak menata melainkan menyerahkannya pada dusun yang berhubungan buat menata serta mengurus cocok dengan adat istiadat serta aturan yang legal.

Menurut Marzali (2015), seluruh dusun yang terdapat di Indonesia dipecah ke pada 3 jenis bagi tingkatan kemajuannya, ialah jenis dusun swadaya buat dusun yang sangat

tunagrahita, jenis dusun swakarya buat dusun menengah, serta jenis dusun bebas buat dusun sangat maju. Bagi Hukum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 mengenai dusun, dusun merupakan dusun serta dusun adat ataupun yang diucap dengan julukan lain, berikutnya diucap dusun, merupakan kesatuan warga hukum yang mempunyai batasan area yang berhak buat menata serta mengurus hal rezim, kebutuhan warga setempat bersumber pada prakarsa warga, hak asal ide, serta atau ataupun hak konvensional yang diakui serta dihormati pada sistem Rezim Negeri Kesatuan Republik Indonesia.

Kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online), adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman. Kata dasarnya yaitu sejahtera yang artinya aman sentosa dan makmur, sedangkan kesejahteraan sosial adalah keadaan sejahtera masyarakat (diakses tanggal 7 Januari 2022).

Keselamatan social di negara- negara maju diucap dengan sosial security ataupun agunan social yang diselenggarakan oleh negeri paling utama buat golongan yang kurang asian ataupun disadvantage groups. Di Indinonesia, keselamatan social diamati selaku misi ataupun situasi kehidupan yang aman ialah terpenuhinya keinginan utama orang. Menurut Soeharto (2011) pada bukunya mengenai Analisa Kebijakan KHALAYAK, menerangkan hal gimana PBB memaknakan keselamatan social selaku kegiatan- kegiatan yang terorganisir, yang tujuannya buat menolong orang serta warga penuhi keinginan bawah serta menaikkan keselamatan searah dengan kebutuhan keluarga serta warga. Pada perihal ini, membuktikan kegiatan- kegiatan yang diselenggarakan bagus oleh lembaga lembaga penguasa ataupun swasta yang bermaksud buat menghindari, menanggulangi ataupun membagikan partisipasi kepada jalan keluar permasalahan social, kenaikan mutu hidup orang, golongan, serta warga.

Bagi Suud (2006), keselamatan social fokus perhatiannya pada banyak orang yang memiliki keinginan hendak jasa social dari lembaga- lembaga keselamatan social, khususnya yang tidak bisa memenuhinya bersumber pada patokan pasar. Oleh karena itu, keselamatan social diperlukan buat melikat tingkatan terpenuhinya keinginan orang.

Permasalahan social yang berhubungan dengan kenaikan kehidupan warga Dusun Sodo dirasa perlu dianalisis buat memperoleh informasi serta data yang diperlukan berbagai golongan pada menelaah kemajuan dusun. Walaupun hidup pada kesahajaan, tetapi warga mempunyai hak buat menemukan sarana, alat dan infrastruktur, peruntukan anggaran dusun buat menaikkan keselamatan dusun. Dengan begitu, tingkatan perkembangan suatu dusun amat ditetapkan oleh perhatian penguasa pada membagikan jasa yang sebaik bisa jadi pada bermacam aspek.

Artikel ini ditulis untuk melihat bagaimana dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sodo. Desa Sodo dijadikan tempat penelitian karena mendapatkan Dana Desa (DD) untuk mensejahterakan masyarakat setempat.

Landasan Teori

Dalam artikel ini, penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu Penggunaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

Putra Nugraha (2019) dengan judul artikel Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Desa Maleku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip good governance yaitu partisipatif, transparan, dan pertanggung jawaban.

Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara, serta data sekunder yang berupa data pendukung yang diperoleh dari pemerintah Desa Maleku. Hasil penelitian diperoleh bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maleku sudah memenuhi prinsip-prinsip good governance yaitu partisipatif, transparan, dan pertanggung jawaban yang sudah dilaksanakan dengan baik, baik dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang sudah diselenggarakan oleh pemerintahan Desa Maleku. Dalam pengelolaan ADD dari perencanaan sudah sangat partisipatif dapat dilihat bahwa masukan-masukan dari warga Desa Maleku melalui masyawarah merupakan hal yang sangat penting dalam usaha perencanaan pembangunan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang akan diterima Desa Maleku.

Keselamatan social untuk warga bisa bertambah, yang dari awal mulanya cuma memercayakan zona pertanian saja, tetapi dikala ini terdapat upaya mandiri yang dicoba oleh warga buat menopang ekonomi keluarga. Semacam penataran pembibitan melekatkan buat meningkatkan basis energi manusianya. Tidak hanya itu, keringanan buat memperoleh pupuk yang ekonomis serta bisa dibayar dalam dikala panen amat menolong warga kurangi bobot perkara pada mengusahakan tanah pertanian mereka.

Tata Pemerintahan dan Masyarakat

Terdapat 3 tiang aturan rezim(governance), ialah penguasa, bumi upaya swasta, serta warga. Governance merupakan paradigma terkini pada aturan pengelolaan pemerintahan. Lebih dahulu, pengelolaan penguasa yang bertumbuh ialah government selaku salah satunya pelaksana penguasa. Dengan beranjaknya paradigma government ke governance, yang menekankan kombinasi pada kesetaraan serta penyeimbang antara penguasa zona swasta serta civil society(warga awam), sehingga dibesarkan pemikiran ataupun paradigma terkini administrasi khalayak yang diucap dengan pemerintahan yang bagus(good governance) (Mardiasmo, 2021).

Pada bagan mensupport good governance pada penyelenggaraan dusun, pengelolaan finansial dusun dicoba bersumber pada prinsip aturan mengurus ialah transparan, akuntabel, serta partisipasif dan dicoba dengan teratur serta patuh perhitungan. Selanjutnya merupakan penafsiran kejernihan, akuntabilitas, serta partisipasif.

1. Kejernihan, pada Artikel 4 bagian 7 Peraturan Menteri Pada Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, mengenai Prinsip Pengelolaan Finansial Wilayah, tembus pandang ialah prinsip kelangsungan yang membolehkan warga buat mengenali serta memperoleh akses data seluas- luasnya mengenai finansial wilayah. Dengan terdapatnya kejernihan menjamin akses ataupun independensi untuk tiap orang buat mendapatkan data mengenai penyelenggaraan rezim, ialah data mengenai kebijaksanaan, cara pembuatan serta penerapannya, dan hasil- hasil yang dicapai.
2. Akuntabilitas merupakan peranan buat membagikan pertanggung balasan atas aksi seorang tubuh hukum arahan sesuatu kelompok pada pihak yang mempunyai hak ataupun wewenang buat menyambut penjelasan ataupun pertanggung balasan.
3. Partisipasif merupakan aktivitas masyarakat pada menyuarakan opini pada pembuatan ketetapan, bagus dengan cara langsung ataupun melewati intermediasi institusi legalitas yang menggantikan kepentingannya Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. (Sari & Abdullah, 2017). Dana Desa (DD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa. Data menunjukkan pada tahun 2015 jumlah dana desa di Jawa Timur adalah sebesar Rp 1.161.076.912.591 (Kementrian Keuangan RI, 2014).

Bersumber pada hasil penilaian 3 tahun penerapan anggaran dusun ini, teruji anggaran dusun sudah membuahkan alat serta infrastruktur yang berguna pada warga besar berbentuk pembangunan lebih dari 95, 2 ribu km jalur dusun, 91, 14 ribu km jembatan, 22. 616 bagian sambungan air bersih, 2. 202 bagian bonus perahu, 14. 957 bagian sekolah PAUD, 4. 004 bagian Polindes, 19. 485 bagian sumber, 3. 106 pasar dusun, 103. 405 bagian pemograman serta pengairan, 10. 965 bagian Posyandu, serta 1. 338 bagian bendungan sepanjang rentang waktu 2015- 2016.(Harian& Mea, 2021)

Misi pemakaian DD(Anggaran Dusun) merupakan buat mendanai penyelenggaraan penguasa, penerapan pembangunan prasarana, pembinaan warga, serta pemberdayaan warga. Bagi Peraturan Penguasa Nomor 60 Tahun 2014 anggaran dusun diprioritaskan buat pembangunan desa.

Pada Peraturan Penguasa 72 atau 2005 Artikel 1 Bagian 11, Peruntukan Anggaran Dusun(ADD) ialah anggaran yang dialokasikan oleh penguasa kabupaten atau kota buat dusun, yang sumbernya dari bagian anggaran perimbangan finansial pusat serta wilayah yang diperoleh oleh kabupaten atau kota. Bagian anggaran perimbangan finansial pusat serta wilayah terdiri atas anggaran untuk hasil pajak serta basis energi alam ditambah Anggaran Peruntukan Biasa(DAU) sehabis dikurangi berbelanja karyawan. Pada pasal itu dipaparkan pula kalau Peruntukan Anggaran Dusun merupakan 70 Persen buat pemberdayaan warga serta pembangunan dan 30 Persen buat penguasa dusun serta BPD.

Bagi Solekhan(2012) kewajiban pembantuan dari penguasa, penguasa provinsi, serta penguasa kabupaten pada dusun wajib diiringi dengan pembiayaan, alat serta infrastruktur, dan basis energi orang. Oleh sebab itu, ada perhitungan selaku modal pembangunan buat keselamatan warga yang diketahui dengan Peruntukan Anggaran Dusun(ADD). ADD sesungguhnya merupakan sambungan dari program dorongan dusun tahun 1969 yang diadakan oleh penguasa pusat pada wujud inpres pembangunan dusun. Namun, semenjak berlakunya otonomi wilayah, ADD setelah itu dialokasikan melewati APBDes. Oleh karena itu, penguasa kabupaten harus membagikan keyakinan pada penguasa dusun selaku dusun bebas buat mengatur perhitungan sesuatu aktivitas cocok dengan kewajiban utama serta gunanya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menjawab rumusan masalah yang sudah disusun, dengan menekankan pada penilaian atas

isu dan fenomena yang diteliti. Pendekatan kualitatif bersifat natural karena penelitiannya dilakukan pada objek yang berkembang apa adanya, tidak dapat dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika tersebut.

Dengan mendalam, periset hendak mengatakan pengelolaan peruntukan anggaran dusun mulai dari pemograman, penerapan, serta peliputan. Basis informasi yang dipakai pada riset ini terdapat 2, ialah informasi pokok yang berbentuk hasil pemantauan serta tanya jawab langsung dengan Ayah Kepala Dusun Sodo, serta informasi inferior yang berbentuk informasi pendukung yang didapat dari lembaga penguasa Dusun Sodo.

Analisa informasi dicoba sehabis memperoleh informasi di alun- alun. Langkah- langkah yang dicoba diawali dengan melakukan pemantauan serta tanya jawab di alun- alun, mengklasifikasikan informasi yang diperoleh dari pemantauan serta asumsi hasil tanya jawab kepada permasalahan yang diawasi, membuat campuran dari hasil tanya jawab, serta menarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Informasi Umum Desa Sodo

Bagi wikipedia, Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat rezim Kabupaten Tulungagung berada di Kecamatan Tulungagung. Tulungagung populer selaku salah satu dari sebagian wilayah penghasil pualam terbanyak di Indonesia, serta terdapat 154 kilometer barat energi Kota Surabaya, bunda kota Provinsi Jawa Timur(diakses 8 Januari 2022)

Kabupaten Tulungagung terdiri dari 19 Kecamatan, 14 Kelurahan, serta 257 Dusun(dari keseluruhan 666 Kecamatan, 777 Kelurahan, serta 7. 724 Dusun di Jawa Timur). Dalam tahun 2017, jumlah penduduknya menggapai 1. 098. 557 jiwa dengan besar area 1. 055, 65 kilometer persegi serta edaran masyarakat 1. 040 jiwa atau kilometer persegi. Salah satu Kecamatan yang terdapat di Tulungagung merupakan Kecamatan Pakel. Kecamatan Pakel mempunyai besar area 36, 10 kilometer persegi serta mempunyai 19 Dusun. Salah satu Dusun yang memperoleh anggaran dusun merupakan Dusun Sodo yang ada di Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Dusun Sodo mempunyai besar area sebesar 172, 78 ha(hektare) yang sebagian besar lingkungannya merupakan pemukiman warga, zona persawahan, serta sekolah. Bagi kasun, Dusun Sodo mempunyai 2 Desa ialah Desa Sodo serta Desa Jambe. Sebaliknya bagi adat,

Dusun Sodo mempunyai 5 Desa ialah, Desa Sodo, Desa Pelem, Desa Bengong, Desa Jambe, serta Desa Ngaglik. Dusun Sodo mempunyai jumlah RT sebesar 16 serta RW sebesar 4. Ada pula pinggiran area Dusun Sodo ialah bagian utara berbatasan dengan Desa Pakel, bagian selatan berbatasan dengan Dusun Jamblang, bagian barat berbatasan dengan Dusun Sukoanyar, serta bagian timur berbatasan dengan Dusun Ngebong serta Dusun Jamblang. Dusun Sodo mempunyai jumlah masyarakat dekat 3. 255 jiwa yang terdiri atas 1. 197 Kepala Keluarga. Dengan jumlah perbandingan penduduk laki-laki sebanyak 1.599 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.656 jiwa.

Ada pula mata pencaharian masyarakat Dusun Sodo yang terbanyak merupakan orang tani dengan presentase 60 Persen, gembala 15 Persen, serta orang dagang 15 Persen. Adapula yang jadi PNS sebesar 5 Persen serta bertugas di luar negara sebesar 5 Persen. Alat serta infrastruktur yang terdapat di Dusun Sodo terdiri atas alat pendidikan mulai PAUD, TK, serta SD. Adapula alat ibadah terdiri dari 7 gedung langgar serta 12 gedung mushola. Ada pula alat kesehatan dikala ini ada satu Polindes serta 3 gedung buat Posyandu. Alat Polindes banyak dikunjungi masyarakat dari Dusun Sodo serta masyarakat luar Dusun Sodo yang sedang bertetangga. Tetapi, masyarakat Dusun Sodo pula banyak yang langsung berangkat ke Puskesmas Pakel yang tempatnya tidak jauh dari Dusun Sodo. Di Dusun Sodo belum terdapat alat rumah sakit, tetapi masyarakat dapat memperoleh jasa rumah sakit yang terdapat di Kecamatan Bandung dengan jarak kurang lebih 5 kilometer dari Dusun Sodo.

Kondisi Masyarakat di Desa Sodo

Jumlah keluarga prasejahtera sebanyak 149 KK, jumlah keluarga sejahtera 1 sebanyak 90 KK, jumlah keluarga sejahtera 2 sebanyak 712 KK, jumlah keluarga sejahtera 3 sebanyak 219 KK, d Bersumber pada informasi dari kantor Dusun Sodo, membuktikan kalau masyarakat Dusun Sodo kesehariannya bergulat dibidang pertanian, spesialnya memasak antah. Masyarakat berupaya gimana supaya tumbuhan antah mereka bisa membuahkan panen banyak ruah. Di dasar orang tani, informasi membuktikan mata pencaharian masyarakat Dusun Sodo merupakan memelihara serta orang dagang. Pada aspek peternakan, mayoritas masyarakat menjaga ayam, kambing, serta lembu. Sebab sebagian besar area dusun merupakan persawahan, sehingga masyarakat dusun kerap mencari rumput disitu. Pada berbisnis, masyarakat dusun menjual sayur- mayur serta lauk pauk. Lauk pauk semacam ayam goreng, pepes ikan, pepes ayam, mie goreng, serta sedang banyak lagi yang lain.

Pemasukan dari bertani, memelihara, serta berbisnis itu lah yang menghidupi keluarga

mereka tiap hari. Pula keinginan yang lain pula bermacam, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Bersumber pada informasi dari Kantor Dusun Sodo tahun 2021, tingkatan keselamatan warga dipecah jadi prasejahtera, aman 1, aman 2, aman 3, serta aman 3 plus.

an jumlah keluarga sejahtera 3+ adalah 21 KK. Menurut penelitian, keluarga sejahtera 1 memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan keluarga prasejahtera. Keluarga sejahtera 2 dan 3 memiliki tingkat ekonomi menengah, dan keluarga sejahtera 3+ memiliki tingkat ekonomi yang tinggi.

Walaupun nilai keluarga aman lebih besar dari keluarga prasejahtera, tetapi nilai itu sedang amat besar bagi periset. Warga dengan ekonomi kecil sedang kesusahan pada penuhi keinginan tiap hari. Terlebih yang telah mempunyai anak yang wajib mengenyam pendidikan serta menginginkan anggaran yang tidak sedikit. Warga memercayakan anggaran dari zona pertanian alhasil alat serta infrastruktur di Dusun Sodo menginginkan atensi dari penguasa. Oleh sebab itu, anggaran dusun muncul buat penuhi keinginan itu.

Pada kehidupan tiap hari, masyarakat Dusun Sodo kerap melaksanakan aktivitas tolong-membantu sesama pada perihal pangan pada orang sebelah yang menginginkan. Tidak cuma pertanyaan pangan, banyak lagi dorongan yang lain. Ini diucap dengan surat berharga deposito social pada ilmu antropologi. Surat berharga deposito social pula dimaksud selaku upaya dari orang, golongan keluarga, masyarakat satu dusun, swasta, serta institusi- institusi penguasa pada menanggulangi bermacam keinginan bawah dari anggota- anggota warga semacam materi santapan, busana, perumahan, jasa kesehatan, pendidikan, serta air bersih buat membolehkan mereka penuhi standar kehidupan yang berpadanan dengan aturan- aturan warga.

Sekuritas sosial tradisional adalah sekuritas sosial yang sumbernya dari luar institusi pemerintah yang secara turun-temurun diberikan atau diterima dari adanya hubungan-hubungan sosial seperti hubungan kekerabatan, pertetanggaan, persekampungannya, pertemanan, patron-klien, dan sebagainya (Tang,dkk,2012:7). Aktivitas sekuritas sosial di masyarakat merupakan bentuk kepedulian antarsesama dan menciptakan hubungan kekerabatan.

Upaya-Upaya Menyejahterakan Masyarakat

Usaha yang dicoba buat memakmurkan warga Dusun Sodo dicoba dengan mengatur sebaik bisa jadi anggaran dusun buat keinginan warga. Dapat dicoba buat pembangunan saluran pengairan, koreksi jalur, pemasangan paving, saluran drainase, jasa kesehatan, penataran pembibitan pertanian, penataran pembibitan peternakan, penataran pembibitan memasak, serta BLT(Dorongan Langsung Kas). Sebab anggaran dusun buat warga dusun, bukan buat

kebutuhan individu ataupun sedikit orang saja. Oleh karena itu, penguasa dusun berpusat buat menciptakan dusun yang bertumbuh dengan membuat seluruh keinginan warganya.

Basis pemasukan Dusun Sodo tahun 2021 berawal dari pemasukan asli dusun, Anggaran Dusun, Peruntukan Anggaran Dusun, untuk hasil pajak serta pungutan wilayah Kabupaten Tulungagung, serta pemasukan lain- lain. Pemasukan Asli Dusun(PAD) berawal dari pendapatan tanah kas dusun, Bumdes, toko kepunyaan dusun, kekayaan dusun, gedung kepunyaan dusun yang disewakan, swadaya serta kesertaan warga dan memikul royong. Anggaran dusun berawal dari Perhitungan Pemasukan Berbelanja Negeri(APBN) yang diperuntukkan buat Dusun yang ditransfer melewati APBD Kabupaten atau Kota dan dipakai buat mendanai penyelenggaraan rezim, penerapan pembangunan, pembinaan, serta pemberdayaan msyarakat. Peruntukan Anggaran Dusun(ADD) berawal dari APBD ialah 10 Persen dari DAU(Anggaran Peruntukan Biasa) ditambah dengan DBH(Anggaran Untuk Hasil). Untuk hasil pajak serta pungutan wilayah berawal dari pajak yang dipungut dalam tingkatan administrasi dusun setelah itu diserahkan pada rezim wilayah yang berikutnya diatur Kabupaten pada perihal penjatahan pajak. Pemasukan lain- lain berawal dari pihak ketiga semacam patron aktivitas serta donasi.

Tabel 1. Sumber Pendapatan Desa Sodo Tahun 2021

NO	SUMBER PENDAPATAN DESA	JUMLAH
1.	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp 216.000.000
2.	Dana Desa (DD)	Rp 818.604.000
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp 401.587.000
4.	Bagi hasil pajak dan retribusi daerah	Rp 31.000.000
5.	Pendapatan lain-lain	Rp 19.000.000
	Total	Rp 1.486.191.000

Sumber: Kantor Desa Sodo

Dari bagan di atas bisa dituliskan kalau pemasukan dusun berasal dari Pemasukan Asli Dusun(PAD), Anggaran Dusun(DD), Peruntukan Anggaran Dusun(ADD), untuk hasil pajak serta pungutan wilayah, serta pemasukan lain- lain. Dari basis pemasukan yang terdapat, anggaran dusun yang bersuber dari APBN yang sangat besar jumlahnya, ialah Rp 818. 604. 000. Berikutnya terdapat Peruntukan Anggaran Dusun sebesar Rp 401. 587. 000. Anggaran

seperti itu yang hendak dipakai spesial buat pembangunan prasarana serta pemberdayaan warga dan modal warga buat menaikkan derajat kehidupan untuk keselamatan social

Dalam cara dini pengelolaa anggaran dusun, warga wajib dilibatkan. Warga hendak melaksanakan konferensi perundingan buat merundingkan perihal apa saja yang diperlukan, dibiayai serta memastikan pengelolah aktivitas anggaran dusun. Pada cara ini, kesertaan warga amat dibutuhkan karena merekalah yang menikmati hasilnya buat keselamatan warga. Oleh karena itu, kejernihan amat berarti buat menjaga pengelolaan anggaran dusun. Tiap hasil konferensi perundingan hendak diumumkan dengan cara langsung serta dengan cara online melalui grub perkumpulan masyarakat dusun. Dengan itu, semua warga bisa memandang serta ikut menjaga cara untuk cara buat menggapai misi ialah keselamatan warga.

Tidak hanya turut dan menjaga pengelolaan anggaran dusun, warga pula dimohon buat turut dan menolong pada perihal daya raga dalam aktivitas pembangunan, semacam pembangunan saluran pengairan, saluran drainase, koreksi jalur ataupun pemasangan paving. Dengan gotong- royong warga, pembangunan hendak kilat berakhir serta bisa dinikmati oleh semua warga dusun.

Implikasi Dana Desa di Desa Sodo

Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang ada di Desa Sodo yang berkenaan dengan penggunaan dana desa:

1. Bidang Pendidikan

Di Dusun Sodo alat pendidikan diawali dari PAUD, TK, serta SD. Buat pendidikan tahapan SMP serta SMA, warga berpelajaran di luar Dusun Sodo yang lokasinya tidak sangat jauh. Ada pula buat pendidikan keimanan bisa ditempuh dengan pendidikan TPA serta TPQ. Bersumber pada informasi yang terdapat di Kantor Dusun Sodo, ada satu bangunan sekolah PAUD, satu bangunan sekolah TK, serta 2 bangunan sekolah bawah. Sebaliknya buat TPA serta TPQ umumnya dilaksanakan di pada langgar. Tidak hanya warga setempat, sekolah- sekolah itu pula banyak disukai oleh warga dari luar Dusun Sodo sebab prasarananya lumayan baik serta komplit.

Pada peruntukan anggaran dusun, Kepala Dusun Sodo berkata kalau anggaran dusun dipakai buat menolong warga yang kurang sanggup pada perihal pendidikan. Semacam pemberian novel free, perlengkapan tulis- menulis, sampai sebetul. Penguasa dusun pula membuat sarana pendidikan yang bagus supaya para peserta didik aman pada aktivitas berlatih. Alhasil nanti bisa jadi peserta didik yang bermanfaat untuk nusa, bangsa, serta agama.

2. Bidang Kesehatan

Pada aspek kesehatan, Dusun Sodo mempunyai alat berbentuk satu bangunan polindes buat warga yang lagi sakit. Dusun Sodo pula mempunyai 3 bangunan posyandu buat aktivitas PMT anak serta Pengimunan. Buat warga kurang sanggup, penguasa dusun hendak meniadakan pembayaran penyembuhan. Ini dicoba supaya bisa memudahkan bobot masyarakat yang kurang sanggup. Polindes pula mempersiapkan pengecekan free buat para lanjut usia yang terdapat di Dusun Sodo. Sebaliknya buat posyandu hendak membagikan pengimunan dengan cara free buat bocah. Ini merupakan salah satu pemakaian anggaran dusun..

3. Bidang Pertanian dan Peternakan

Dalam bidang pertanian, dana desa digunakan untuk membangun saluran irigasi, pelatihan, dan jalan usaha tani. Pelatihan berupa pelatihan pertanian, seperti menanam padi, sosialisasi, panen, dll. Pemerintah desa juga memberikan pupuk gratis untuk para petani di Desa Sodo. Menurut masyarakat, hal tersebut sangat bermanfaat bagi mereka dan menjadikan mereka semangat bertani. Dalam bidang peternakan, warga akan diberikan pelatihan beternak yang baik kemudian diberi tip jitu agar hewan ternak tumbuh sehat dan bernilai jual tinggi.

4. Bidang Sosial

Anggaran dusun pada aspek social dipakai buat menolong keluarga kurang sanggup berbentuk Dorongan Langsung Kas(BLT) serta program keluarga miskin. Penguasa berambisi dengan terdapat nya dorongan itu, keluarga miskin bisa menyambung hidupnya tanpa takut tidak dapat makan. Tidak hanya itu anggaran dusun pula dipakai buat aktivitas social kematian, semacam sediakan sarana perlengkapan membersihkan jenazah ialah kain kafan, keranda, bangku, gayung, gentong air, mobil pick up, tempat tidur buat jenazah, serta serupanya yang berhubungan dengan jenazah. Terdapat pula penataran pembibitan memasak buat ibu- ibu masyarakat Dusun Sodo tanpa bayaran sepeser juga. Setelah itu mereka hendak diserahkan perlengkapan masak yang memadai.

5. Infrastruktur Desa

Alat serta infrastruktur yang terdapat di Dusun Sodo lumayan mencukupi, meski sedang kira- kira terabaikan dengan dusun lain pada perihal pembangunan prasarana. Tetapi, dalam tahun 2021, penguasa dusun telah banyak membuat prasarana, mencakup lampu jalur, koreksi jalur aspal, membuat jalur paving, saluran drainase, merenovasi gedung dusun, merenovasi

polindes, merenovasi posyandu. Ini dicoba pastinya buat keselamatan warga Dusun Sodo.

Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

Akuntabilitas pengelolaan anggaran dusun di Dusun Sodo telah penuh prinsip-prinsip good governance, ialah mencakup partisipatif, tembus pandang, serta pertanggungjawaban yang sudah dilaksanakan dengan amat bagus. Ini bisa diamati mulai dari pemograman setelah itu penerapan kemudian peliputan yang dicoba Penguasa Dusun Sodo. Pada pengelolaan anggaran dusun, bisa disimpulkan kalau telah partisipatif. Perihal itu bisa diamati dari konferensi yang dicoba bersama warga Dusun Sodo serta suara-suara orang buat pemograman pembangunan alat serta infrastruktur dusun.

Dalam kesimpulannya keselamatan social warga di Dusun Sodo amat bertambah. Dari mulanya cuma bertani, saat ini usaha-usaha telah mulai bermunculan buat penuh keinginan ekonomi keluarga, ini merupakan guna penataran pembibitan memasak serta memelihara. Warga mulai melihat upaya itu. Sebab memanglah omset yang diperoleh lumayan mengguyurkan. Tidak hanya itu, pemberian pupuk free pula amat menolong warga pada bertani. Sebab bisa kurangi bobot bayaran.

B. Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang penulis berikan untuk pembuatan artikel selanjutnya:

1. Untuk pemerintah Desa Sodo, lebih dipertegas lagi dalam memberi bantuan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar tepat sasaran. Karena masih ada yang mendapat BLT namun keluarga berada pada tingkat keluarga sejahtera 3+.
2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti lebih dalam lagi agar mempermudah penyusunan isi artikel.

Daftar Pustaka

- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Marzali, A. (2015). *Antropologi & kebijakan publik*. Prenada Media.
- Nugraha, P. (2019). Kesejahteraan Sosial Masyarakat terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Maleku. *Walasuji*, 10(2), 303–315.

- Nur, A., Ua, A., Fitrianti, A. N., & Melinda, F. (2017). Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ulujangang Kecamatan Bontolempangan. *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1).
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga.
- Sari, I. M., & Abdullah, M. F. (2017). Analisis ekonomi kebijakan dana desa terhadap kemiskinan desa di kabupaten tulungagung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 34–49.
- Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan pemerintahan desa: berbasis partisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas*. Setara.
- Suharto, E. (2011). Kebijakan sosial. Bandung: Alfabeta.
- Suud, M. (2006). *Tiga orientasi kesejahteraan sosial*.
- Tang, Mahmud, dkk. 2012. “Berbagai Bentuk Sekuritas Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan pada Komunitas Nelayan di Pulau Salemo, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan dan Rangas Barat, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi barat”, dalam Laporan Akhir Penelitian: Pengentasan Kemiskinan. Online: repository.unhas.ac.id/ diakses tanggal 10 Januari 2022.